



Implementasi Kebijakan Pembuatan Izin Mendirikan Bandungan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung

(Policy Implementation in the Building Permit (IMB) at the Office of Investment Board One Stop-Service – Bandung)

Tatik Fidowaty

Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, 40132, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Oct 22, 2021

Revised: Nov 03, 2021

Accepted: Nov 25, 2021

Available online: Oct 26, 2021

KEYWORDS

Policy Implementation, Building Permits (IMB), Management Information System, Public Services

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Fidowaty, T. (2021) Implementasi Kebijakan Pembuatan Izin Mendirikan Bandungan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(2), 1-9.

ABSTRACT

This research was carried out to acknowledge the factors that influence the implementation of the One-Stop Integrated Licensing Service Management Information System (SIM-PPTSP) policy in the building permits at the Bandung City, Indonesia. This research is motivated by the IMB service that has not been maximized, this can be observed from the lack of public interest in managing the building permit due to the convoluted process, the high cost, and the long process of obtaining the license (IMB). Based on this background, the authors researched with the major hypothesis, whether the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure together affect the implementation of SIM-PPTSP policies in the city. The theory of Edward III (1980) was applied in the study. Participants of the study were selected through a simple random sampling technique. The data collection procedure was carried out by distributing questionnaires, observations, and reviewing works of literature. Questionnaires were distributed to 58 employees at the Bandung City Government's Integrated Licensing Service Agency. The data analysis method used is path analysis. The results show that from the sub-variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, there is one sub-variable that is not significant to policy implementation, namely resources. This confirms that the sub-variable resources have not been implemented properly. When viewed simultaneously, the effect is large; 0.928.

PENDAHULUAN

Pada saat ini perijinan di Kota Bandung masih mengalami banyak kendala atau permasalahan. Masyarakat dan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama biaya-biaya yang tidak resmi sehingga masyarakat yang akan membuat perijinan mendirikan bangunan seringkali harus bolak-balik dari satu meja ke meja lain.

Proses birokrasi yang berbelit-belit ini, sering membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah tanpa bisa melakukan komplain atau pengaduan, sehingga berakibat munculnya citra buruk terhadap pemerintah. Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung, merupakan perijinan yang sulit dan berbelit-belit hal ini dikarenakan IMB memerlukan persyaratan yang panjang mulai dari ijin lokasi, ijin gangguan, AMDAL dan ijin reklame. Selain melalui tahapan-tahapan ini, pemohon juga harus beberapa kali mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait.

Terkait dengan pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat. Intruksi Peresiden Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Investasi dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan jawaban terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melakukan beberapa terobosan baru. Salah satu bentuk terobosan itu adalah dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Jo. Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dengan adanya SIM-PPTSP pemerintah dapat memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sehingga masyarakat bisa mendapatkan IMB dengan cepat. Ide dasar dari kebijakan SIM-PPTSP ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perijinan kedalam suatu sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu (*one-stop-service*) supaya masyarakat yang akan mendirikan bangunan bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan cepat mengingat banyaknya masyarakat yang akan mendirikan bangunan. Penggunaan SIM-PPTSP dapat menjadi alat bantu badan pelayanan perijinan terpadu Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan khususnya ijin mendirikan bangunan kepada masyarakat dan dunia usaha serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Jones (1996) menyampaikan implementasi kebijakan, yaitu: *Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu). Karena implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan karena kebijakan yang di buat hanya akan menjadi sebuah impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak di implementasikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Thoriq (2005) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang maka, keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan dapat diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan petugas pembuatan IMB terhadap aturan yang berlaku
2. Pelaksanaan tahapan-tahapan pembuatan IMB
3. Pencapaian target jumlah pembuatan IMB
4. Keluasan bidang tanah dalam pembuatan IMB

5. Kecepatan proses pembuatan IMB
6. Keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pembuatan IMB
7. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat
8. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembuatan IMB

Edwards III mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- “1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Disposition*
4. *Bureaucratic Structure*”.

(Edwards III, 1980).

Pertama, Komunikasi dapat dibayangkan sebagai suatu proses atau aliran, dimana terdapat langkah-langkah antara satu sumber dan penerima yang menghasilkan penransferan dan pemahaman makna Robbin S. P (1996:22-23). Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edwards III (1980:25) komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo (2007:105) terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain: “Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan”.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparaturnya dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 58 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

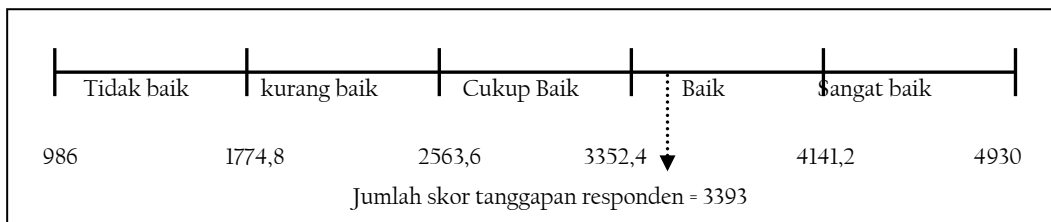
Analisis Deskriptif variabel X dan Y

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka % tanggapan responden terhadap variabel X adalah

Tabel 1: Akumulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel X

| No. | Sub Variabel | % Skor | Kriteria |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 1. | <i>Communication</i> | 68,79 | Baik |
| 2. | <i>Resources</i> | 68,10 | Baik |
| 3. | <i>Disposition</i> | 69,22 | Baik |
| 4. | <i>Bureaucratic Structure</i> | 69,24 | Baik |

Akumulasi jumlah skor jawaban responden untuk varibel X dari 17 butir pertanyaan dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:

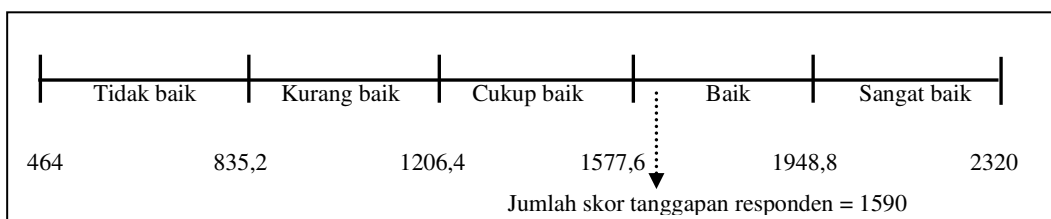


Jumlah skor tanggapan responden atas 17 butir pertanyaan pada variabel X adalah $796 + 790 + 803 + 1004 = 3393$. Jadi dengan berpedoman pada pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden dapat dilih pada Tabel 2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka % tanggapan responden terhadap variabel Y adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Akumulasi Tanggapan Responden Variabel Y

| No. | Indikator | % Skor | Kriteria |
|-----|--|--------|----------|
| 1. | Kepatuhan petugas pembuatan IMB terhadap aturan yang berlaku | 69,31 | Baik |
| 2. | Pelaksanaan tahapan-tahapan pembuatan IMB | 73,45 | Baik |
| 3. | Pencapaian target jumlah pembuatan IMB | 70,34 | Baik |
| 4. | Keluasan bidang tanah dalam pembuatan IMB | 70,34 | Baik |
| 5. | Kecepatan proses pembuatan IMB | 67,93 | Baik |
| 6. | Keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pembuatan IMB | 68,97 | Baik |
| 7. | Kesesuaian biaya | 67,57 | Baik |
| 8. | Pemahaman masyarakat dalam kebijakan pembuatan IMB | 63,45 | Baik |

Akumulasi jumlah skor jawaban responden untuk varibel Y dari 8 butir pertanyaan dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:



Jumlah skor tanggapan responden atas 8 butir pertanyaan pada variabel Y adalah $201 + 213 + 204 + 204 + 197 + 200 + 187 + 184 = 1590$. Jadi dengan berpedoman pada pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden dapat diartikan bahwa secara keseluruhan tanggapan responden terhadap variabel Y (implementasi kebijakan IMB) dalam kategori cukup baik.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, di dapat koefisien korelasi variable bebas X dengan variable Y, sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi X_1 dengan variable Y, $r = 0,730$, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara X_1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0 , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable X_1 maka semangkin besar nilai Y.
2. Koefisien korelasi X_2 dengan variable Y, $r = 0,570$, ini berarti terdapat hubungan yang cukup antara X_2 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0 , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable X_1 maka semangkin besar nilai Y.
3. Koefisien korelasi X_3 dengan variable Y, $r = 0,761$, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara X_1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0 , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable X_3 maka semangkin besar nilai Y.
4. Koefisien korelasi X_4 dengan variable Y, $r = 0,941$ ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara X_1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0 , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable X_4 maka semangkin besar nilai Y.

Berdasarkan matriks korelasi tersebut di atas kemudian dihitung matriks inversnya. Dari pengolahan *software* didapatkan matriks invers seperti yang terlihat pada table 3 di bawah ini:

Tabel 3: Matriks Invers Korelasi antara Variable Bebas (X) dengan Variable Terikat (Y)

| | X_1 | X_2 | X_3 | X_4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| X_1 | 1,000 | -0,723 | 0,162 | -0,591 |
| X_2 | -0,723 | 1,000 | -0,456 | 0,349 |
| X_3 | 0,162 | -0,456 | 1,000 | -0,481 |
| X_4 | 0,349 | 0,349 | -0,481 | 1,000 |

a Dependent Variable: Y

Selanjutnya berdasarkan pada hasil perhitungan matriks korelasi dan invers dapat dihitung koefisien jalur, pengaruh langsung secara keseluruhan dari X_1 sampai X_4 serta koefisien jalur variable lainnya diluar varabel tersebut.

Tabel 4: Besarnya Koefisien Jalur

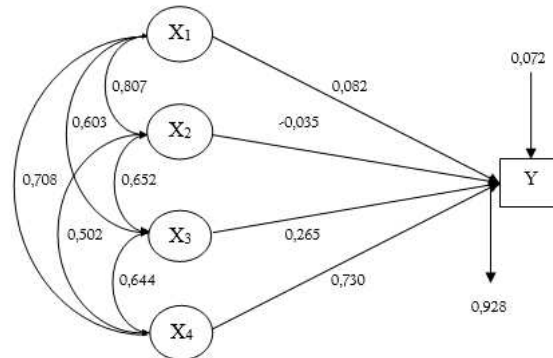
| | |
|---------------------------|-------------------|
| Pengaruh Individual | $P_{yx1} = 0,082$ |
| | $P_{yx2} = -0,05$ |
| | $P_{yx3} = 0,265$ |
| | $P_{yx4} = 0,730$ |
| Pengaruh secara bersamaan | 0,928 |
| Pengaruh koefisien residu | 0,072 |

*Sumber: Hasil olahan SPSS

Berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*) yang terdapat dalam lampiran, koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variable independen terhadap perubahan variable dependean dilihat dari table 5.41 di atas, maka pengaruh secara keseluruhan dari empat sub variable terhadap variable Y adalah 0,928 sedangkan pengaruh variable lainnya diluar X_1 sampai X_4 sebesar 1-0928 atau sebesar 0,072. Sehingga hasil tersebut mengandung arti variable Y dapat dijelaskan oleh variable bebas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan sebesar 92,8 % sedangkan sisanya 7,2 % di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Untuk diagram jalurnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1: Hasil Perhitungan Berdasarkan Diagram Jalur Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIM-PPTSP dalam Pembuatan IMB



Uji F

Dari table F = 2,546. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 di tolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sub variable *communication* (X_1), *resources* (X_2), *disposition* (X_3), *bureaucratic structure* (X_4) yang secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan (Y).

Uji-t

Dari hasil pengujian dari table 5.43 di atas, dapat diketahui bahwa ada satu yang tidak signifikan, adapun interprestasinya sebagai berikut:

1. Untuk uji hipotesis hubungan antara *communication* dengan implementasi kebijakan diperoleh $t_{hitung} = 2,777 > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *communication* dengan implementasi kebijakan
2. Untuk uji hipotesis hubungan antara *resources* dengan implementasi kebijakan diperoleh $t_{hitung} = -9,722 < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *resources* dengan implementasi kebijakan
3. Untuk uji hipotesis hubungan antara *disposition* dengan implementasi kebijakan diperoleh $t_{hitung} = 7,361 > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *disposition* dengan implementasi kebijakan
4. Untuk uji hipotesis hubungan antara *bureaucratic structure* dengan implementasi kebijakan diperoleh $t_{hitung} = 20,277 > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara *bureaucratic structure* dengan implementasi kebijakan

Analisis Pengaruh Parsial Sub Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIM-PPTSP dalam Pembuatan IMB

Apabila dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka secara parsial dapat dikatakan bahwa, untuk sub variable *communication* (X_1) berpengaruh sebesar 0,135 atau 13,5 % terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB. Hal ini bisa diterima karena sub variable *communication* sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Informasi mengenai syarat pembuatan, Harga, lamanya pembuatan IMB dan lain sebagainya sudah tersedia di dalam SIM-PPTSP sehingga masyarakat pembuat IMB dapat mengetahui dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat IMB. Akan tetapi apabila kita lihat besarnya pengaruh yang hanya sebesar 13,5 % menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara aparatur dengan pembuat IMB belum maksimal

hal ini dikarenakan dalam SIM-PPTSP terkadang hanya terjalin komunikasi satu arah saja dari aparaturnya kepada masyarakat begitupun juga sebaliknya. Pembuatan IMB melalui SIM-PPTSP juga tidak dapat selesai apabila pembuat IMB tidak datang ke BPPT untuk melengkapi persyaratan dan melakukan penandatanganan berkas.

Untuk sub variable *resources*, berdasarkan teori dari Edward III, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan, Edward III mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka tidak akan berjalan dengan efektif. Tetapi untuk pengimplementasian kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung berdasarkan hasil uji statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan karena hasil uji statistik sebesar -0,055 atau -5,5 % menunjukkan bahwa *resources* tidak berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP, hal ini disebabkan karena dari beberapa indikator yang ada belum dilaksanakan dengan baik oleh aparaturnya. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan aparaturnya yang tidak mempunyai kemampuan yang baikpun tetap dapat bekerja seperti biasa dan tidak ada sanksi yang tegas. Begitupun juga untuk ruangan, kursi dan peralatan yang lainnya, sehingga pengaruhnya negatif

Untuk sub variable *disposition*, berdasarkan hasil uji hipotesis sebesar 0,396 atau sebesar 39,6 % menunjukkan pengaruh antara *disposition* terhadap implementasi kebijakan IMB, pengaruhnya cukup besar, hal ini dikarenakan watak atau karakteristik yang baik yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, kesopanan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap aparaturnya. Apabila aparaturnya tidak memiliki watak ataupun karakteristik yang baik maka akan menghambat implementasi kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan SIM-PPTSP watak atau karakteristik aparaturnya sudah dalam kategori baik.

Berdasarkan uji statistik, dari keempat sub variable, sub variable *Bureaucratic Structure* sebesar 0,884 atau 8,44 % merupakan sub variable yang pengaruhnya paling besar dalam implementasi kebijakan SIM-PPTSP, hal ini dikarenakan *Bureaucratic Structure* merupakan hal yang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan, suatu kebijakan tidak akan terlaksana tanpa adanya *Bureaucratic Structure* yang baik dan jelas. Aparaturnya harus ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas. *Bureaucratic Structure* yang baik akan menghasilkan pengimplementasi kebijakan yang baik pula.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIM-PPTSP dalam Pembuatan IMB.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh keterangan bahwa terdapat pengaruh antara *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure* terhadap implementasi kebijakan, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,928 atau sebesar 92,8 % ($R^2Y (X_1, X_2, X_3, X_4)$). Sedangkan pengaruh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini sebesar $PY\epsilon$ sebesar 0,072 atau 7,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan empat faktor tersebut sangat menentukan dalam implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 171,490$ dan $F_{tabel} = 2,546$. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan anatara sub variable *communication*, *resources*, *disposition*, *bureaucratic structure* yang secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Dengan demikian secara empirik faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang meliputi *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure* berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP sehingga apabila faktor-faktor tersebut dilaksanakan

dengan baik dan terus menerus maka implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB-pun akan berjalan dengan baik pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Communication* berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Walaupun pengaruhnya kecil, akan tetapi dalam implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB.
2. *Resources* berpengaruh tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB. Hal ini dikarenakan aparatur tidak mendapatkan sanksi yang tegas apabila tidak melakukan pekerjaan yang baik.
3. *Disposition* berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB, pengaruhnya cukup besar yang merupakan pengaruh kedua terbesar setelah *bureaucratic structure*, hal ini disebabkan watak atau karakteristik aparatur BPPT Kota Bandung sudah cukup baik.
4. *Bureaucratic structure* berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan, *bureaucratic structure* merupakan sub variable yang pengaruhnya paling besar terhadap kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB. Hal ini disebabkan *bureaucratic structure* yang ada pada BPPT sudah terlaksana dengan baik.
5. *Communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* secara simultan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, pengaruhnya sangat besar terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka sarannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat pembuat IMB dengan aparatur, lebih baik di buat kolom diskusi interaktif dalam SIM-PPTSP sehingga apabila ada masyarakat pembuat IMB yang kurang mengerti tentang persyaratan IMB dan sebagainya dapat berdiskusi secara langsung tanpa harus datang ke BPPT.
2. Sumber daya yang ada pada BPPT perlu di tingkatkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang lainnya, dengan cara sekolah lagi, seminar bahkan menambahkan infrastruktur. Untuk aparatur yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebaiknya diberikan sanksi yang tegas.
3. Watak ataupun karakteristik aparatur seperti kejujuran, keramahan harus lebih baik lagi, supaya pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal lagi, aparatur yang melayani pembuat IMB dengan baik akan membuat masyarakat masyarakat memiliki keinginan untuk datang membuat IMB.
4. *Bureaucratic structure* sudah dilaksanakan dengan baik sehingga, BPPT perlu mempertahankannya, jangan sampai terjadi penurunan ataupun kemunduran.
5. Untuk lebih memaksimalkan keberhasilan implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB sebaiknya empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 1998. *Perkembangan Dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making, Second Edition*. New York: Holt Rinehart and Winston
- Edwards III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee. S. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Islamy, Irpan. 2004. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: CV.Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1996. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Editor: Nashir Budiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang: Cirao Credentia Centre
- Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid I dan II*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sedarmayanti. 1995. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Wahab, Solihin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.